

Reframing Perilaku Penyalahgunaan Aset dalam Kacamata *Fraud Triangle*: Sebuah Studi Fenomenologis

Ruri Octari Dinata^{1*}, Tri Utami Lestari², Hilda Salman Said³

^{1,2,3}Universitas Telkom

ruryoctari@telkomuniversity.ac.id, triutamilestari@telkomuniversity.ac.id,

hildaaid@telkomuniversity.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 30 Januari 2026

Disetujui : 24 Februari 2026

Dipublikasi : 1 April 2026

ABSTRACT

This study examines a case of asset misappropriation that occurred in a subsidiary of a state-owned enterprise in West Java by exploring behavioral factors as the basis of motives, the perpetrators' modus operandi, and the resulting losses. A qualitative method with a phenomenological approach is employed to understand the phenomenon of asset misappropriation from the perspective of organizational actors' lived experiences. This study was conducted in a subsidiary of a state-owned enterprise, referred to as PT Aman Sejahtera (pseudonym), employing interviews and observations within a phenomenological approach. This study contributes by extending fraud theory through a phenomenological lens that emphasizes behavioral memory and motivation as central mechanisms of asset misappropriation. The findings indicate that asset misappropriation at PT. Aman Sejahtera cannot be understood merely as a consequence of procedural weaknesses or deficiencies in internal control, but rather as a behavioral phenomenon shaped by cognitive processes, individual experiences, and motivations within the organization. Employees' perceptions of deviant behavior are influenced by organizational culture, prior experiences, and social interactions, which subsequently shape judgment and decision-making processes involving ethical considerations, personal risk, and structural relations. Internalized experiences and knowledge form behavioral memories that may either normalize or prevent asset misappropriation, while individual motivation serves as a key link between knowledge and action. These findings emphasize that preventing asset misappropriation requires not only the strengthening of systems and procedures, but also the development of ethical awareness, a healthy organizational culture, and a more humanistic, behavior-oriented accounting approach.

Keywords: *Asset Misappropriation; Fraud Behavior; Humanistic Accounting; Phenomenological Approach, Ethical Rationalization*

PENDAHULUAN

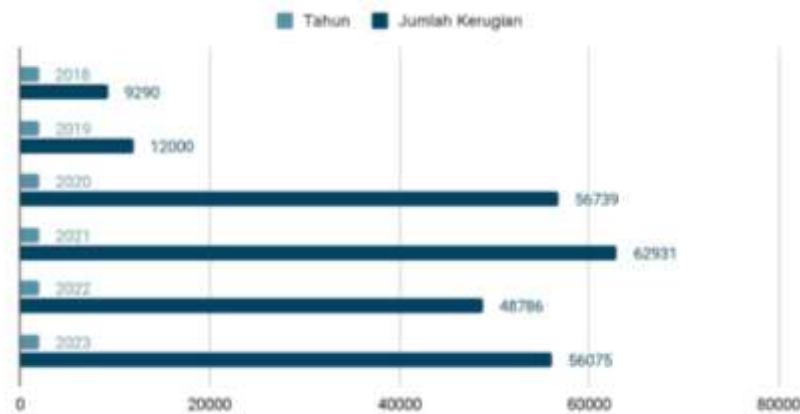
Permasalahan kecurangan (*fraud*) kerap terjadi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Akhir-akhir ini semakin terkuak kasus-kasus *fraud* yang merugikan berbagai pihak. *Fraud* yang terdiri dari 3 jenis menurut teori *Fraud Tree*; korupsi, penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan memiliki posisi tersendiri dalam tingkat kerugian yang dihasilkan menurut laporan *ACFE Report to Nation (2024)* dimana kerugian akibat jenis *fraud* manipulasi laporan keuangan masih menduduki posisi teratas dengan jumlah kerugian mencapai \$766.000 sementara kasus terbanyak yang ditemukan adalah kasus penyalahgunaan aset dengan 89% kasus ditemukan sepanjang tahun 2024 seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 1.1 Kategori dan Kerugian Fraud
 Sumber: ACFE Report Nation 2024

Polemik *fraud* yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kasus ini perlu mendapat perhatian tinggi untuk dicegah. Peningkatan kasus *fraud* yang terjadi juga berdampak pada peningkatan kerugian negara yang dialami. Hal ini dijelaskan dalam laporan *Indonesia*

Corruption (2024) dalam gambar berikut:



Watch

Gambar 1.2. Jumlah Kerugian Negara akibat *Fraud* (dalam dolar)
 Sumber: Laporan ICW 2024

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa kerugian yang dialami negara akibat kasus *fraud* cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana peningkatan yang tinggi terjadi di tahun 2020 dengan jumlah kerugian sekitar 56 triliun rupiah kemudian meningkat di tahun 2021 dengan total kerugian sebesar 62 triliun rupiah, menurun di tahun 2022 dengan total kerugian sekitar 48 triliun rupiah dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan total kerugian sebesar 56 triliun rupiah.

Teori-teori terkait *fraud* yang berkembang mulai dari teori *fraud triangle* sampai dengan *fraud hexagon* telah menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan *fraud*. Dalam *fraud triangle* dijelaskan 3 faktor yang menyebabkan *fraud* yaitu rasionalisasi, kesempatan dan tekanan (Dorminey et al., 2012). Berdasarkan teori *fraud triangle*, Wolfe & Hermanson (2004) menambahkan 1 faktor yang menyebabkan *fraud* yaitu kapabilitas sehingga terbentuklah teori *diamond fraud*. Sementara pada *fraud hexagon* yang dikemukakan oleh Vousinas (2019) terdapat 2 faktor tambahan yang menyebabkan *fraud* yaitu ego dan kolusi.

Faktor-faktor penyebab *fraud* ini tentu tidak terlepas dari perilaku pelaku *fraud* dimana faktor personal juga menjadi salah satu penentu dari perilaku positif ataupun negatif (Pruysers et al., 2019). Perilaku ini secara terus menerus akan berubah menjadi karakteristik yang dapat menciptakan sebuah budaya (Maulidiyah, 2024). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Çollaku et al., 2025) berpendapat bahwa melihat *fraud* dari lensa egoisme seseorang dapat memberikan nuansa yang lebih variatif dengan menggabungkan dimensi tambahan ini mengingat setiap konsep psikologi dapat mempengaruhi perilaku manusia yang bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi. Masalah terkait sifat kepribadian, yang sering dianggap sebagai penyebab

perilaku melanggar hukum, memang bisa dibenarkan. Namun, melakukan tindakan tersebut tidak selalu berhasil jika niat dan cara berpikir pelaku *fraud* tidak jelas atau tidak rasional. Hal ini bisa terjadi karena pelaku belum memiliki pembenaran yang cukup atas tindakannya (Maulidi, 2020). Van Akkeren & Buckby (2017) menjelaskan bahwa rasionalisasi dapat menjadi penghambat sekaligus pendorong bagi seseorang dalam mengambil keputusan yang tidak etis. Dengan cara berpikir ini, seseorang cenderung menunda tindakan sambil mencari alasan untuk membenarkan goaan kepentingan pribadi.

Kondisi terkait perilaku, ataupun faktor-faktor dalam *fraud triangle* yang menjelaskan penyebab terjadinya *fraud* perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam kasus penyalahgunaan aset yang sering terjadi di lingkungan perusahaan. Penyalahgunaan aset terjadi baik di perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan perusahaan, tetapi juga merusak reputasi serta suasana kerja di dalam organisasi. Bahkan, akibat dari jenis kecurangan perusahaan ini tidak berhenti pada lingkup bisnis saja, melainkan juga merugikan masyarakat secara luas (Jiménez Serrano et al., 2025). Republic (2018) juga menunjukkan bahwa kecurangan perusahaan menimbulkan dampak sosial yang negatif, seperti menurunnya semangat kerja karyawan, memburuknya hubungan bisnis, serta rusaknya citra organisasi. Seperti ditunjukkan pada gambar 1.1. bahwa kasus penyalahgunaan aset merupakan kasus yang paling banyak terjadi sepanjang tahun. Hal ini tentu menjadi urgensi pentingnya penelitian dilakukan untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana modus terjadinya penyalahgunaan aset. Salah satu fenomena penyalahgunaan aset yang sering terjadi adalah di industri sektor jaringan dan telekomunikasi yang kerap melakukan pengadaan aset sebagai bagian operasional perusahaan yang harus dilakukan.

Pada penelitian ini akan dilakukan kajian mendalam dengan metode fenomenologi untuk melihat permasalahan perilaku seperti apa yang dapat menjadi pemicu seseorang melakukan penyalahgunaan aset, bagaimana modus tindakannya serta kerugian seperti apa yang menjadi dampak dari tindakan penyalahgunaan aset terjadi berdasarkan teori *fraud* yang telah ada sebelumnya dan berkaca pada kasus-kasus penyalahgunaan aset yang semakin marak terjadi di Indonesia. Dalam kajian mendalam yang dilakukan pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan literasi untuk semakin meningkatkan *fraud awareness* serta menjadi bahan referensi untuk mengembangkan sistem *anti fraud* di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Secara konseptual, teori mengenai *fraud* mengalami perkembangan seiring dengan perubahan konteks organisasi dan dinamika perilaku manusia. Baten (2020) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyalahgunaan, penggambaran yang salah, penyembunyian, atau penghilangan kebenaran yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan penipuan atau manipulasi, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi individu maupun organisasi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk kecurangan, termasuk penggelapan dan pencurian aset.

Salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan terjadinya *fraud* adalah *fraud triangle theory* yang diperkenalkan oleh Schuessler (1954). Teori ini menyatakan bahwa *fraud* muncul ketika tiga elemen utama hadir secara bersamaan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan merujuk pada kondisi pribadi yang bersifat finansial maupun emosional, seperti beban utang, kesulitan ekonomi, kecanduan, tuntutan sosial, atau situasi lain yang menciptakan kebutuhan mendesak terhadap uang. Sementara itu, kesempatan muncul akibat adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan individu melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Faktor ini sering kali berkaitan dengan posisi jabatan, tingkat akses terhadap aset atau sumber daya keuangan, serta lemahnya mekanisme pengawasan dalam organisasi. Adapun rasionalisasi merupakan proses pembenaran internal yang dilakukan oleh pelaku untuk meyakinkan dirinya bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan dapat diterima atau dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Melalui proses ini, pelaku berupaya menghindari rasa bersalah dan, dalam beberapa kasus, cenderung mengulangi perilaku kecurangan tersebut (Jimenez Serrano et al., 2025).

Meskipun *fraud triangle theory* banyak digunakan, teori ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai perilaku kecurangan sebagai bagian dari perilaku menyimpang di tempat

kerja. Kajian mengenai *fraud* telah dilakukan melalui berbagai pendekatan dan paradigma, dengan istilah yang beragam untuk menggambarkan fenomena tersebut (Agnihotri & Bhattacharya, 2020). Dalam banyak penelitian, perilaku *fraud* sering dikaitkan dengan masalah kepribadian dan kondisi emosional individu. Individu pelaku *fraud* dipandang mengalami ketidakmampuan dalam mengendalikan situasi yang dihadapinya, sehingga mendorong munculnya perilaku menyimpang yang berdampak negatif bagi organisasi (Maulidi, 2020). *Fraud triangle theory* memberikan kerangka yang sistematis dalam menjelaskan terjadinya *fraud*, teori ini cenderung merepresentasikan perilaku kecurangan sebagai hasil dari kombinasi faktor individual dan struktural yang bersifat teknis. Pendekatan ini berisiko mereduksi kompleksitas pengalaman manusia dengan memposisikan rasionalisasi semata-mata sebagai mekanisme kognitif individual, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, relasional, dan nilai-nilai yang membentuk cara individu memaknai tindakannya. Dengan demikian, *fraud* tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran prosedural atau kegagalan pengendalian, tetapi juga sebagai fenomena yang sarat dengan makna, konflik moral, dan negosiasi nilai dalam kehidupan organisasi.

Penyalahgunaan aset merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling umum dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang dijelaskan dalam *fraud triangle theory*. Secara umum, praktik ini sering dikaitkan dengan pencurian uang oleh karyawan dalam jumlah yang relatif kecil. Namun, *fraud* juga dapat terjadi melalui penggunaan bahan, peralatan, atau sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ketika pelaku berasal dari jajaran manajemen atau karyawan yang terlibat langsung dalam proses keuangan dan akuntansi, potensi kerugian yang ditimbulkan cenderung lebih besar. Hal ini disebabkan oleh tingkat akses yang lebih luas terhadap dana perusahaan serta kemampuan untuk menyembunyikan kecurangan secara lebih sistematis.

Fenomena *fraud* tidak hanya terjadi pada perusahaan besar atau multinasional, tetapi juga banyak ditemukan pada usaha kecil dan menengah. Sektor-sektor dengan tingkat interaksi operasional yang tinggi, seperti stasiun pengisian bahan bakar, toko kelontong, dan restoran cepat saji, dikenal memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap pencurian oleh karyawan (Hollinger et al., 1992; Wimbush & Dalton, 1997). Meskipun dalam beberapa kasus nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan relatif kecil, dampaknya dapat mengancam keberlangsungan usaha. Selain itu, pada perusahaan berskala kecil, praktik *fraud* sering kali menimbulkan dampak psikologis dan relasional yang lebih besar, mengingat adanya hubungan personal yang lebih dekat antara pemilik usaha dan karyawan yang terlibat dalam tindakan kecurangan tersebut (Jimenez Serrano et al., 2025).

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif dengan metode fenomenologi. Metode fenomenologi dipahami sebagai pertemuan antara kejadian dan kesadaran, di mana pengalaman hidup individu menjadi pusat dalam memahami suatu fenomena. Dalam penelitian ini, fenomenologi digunakan sebagai dasar untuk mengungkap makna yang lebih mendalam mengenai fenomena *fraud*, khususnya pada praktik penyalahgunaan aset yang terjadi. Creswell (2020) menjelaskan bahwa penelitian fenomenologi berfokus pada penggambaran dan pemaknaan pengalaman hidup sejumlah individu terhadap suatu fenomena tertentu. Sejumlah studi sebelumnya juga menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami realitas empiris yang dialami subjek penelitian (Ovcharuk, 2024).

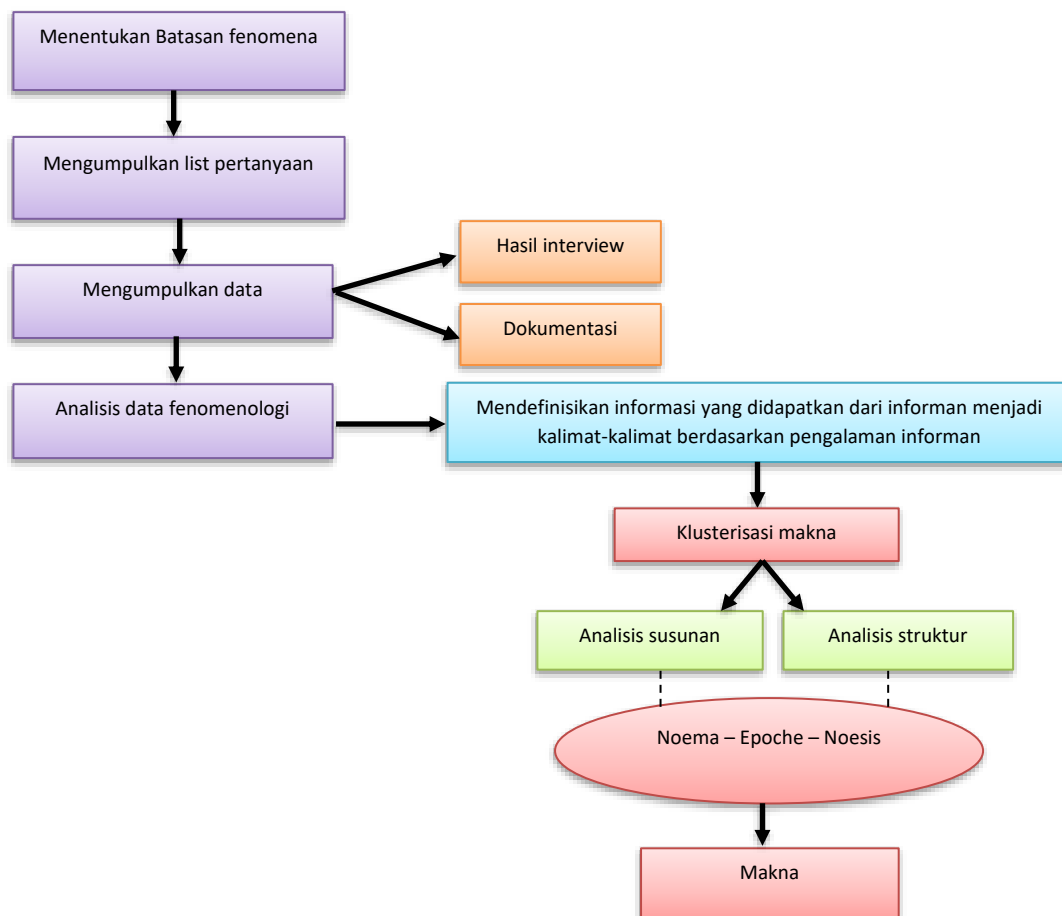
Fenomenologi mengakui keberadaan realitas eksternal, namun realitas tersebut hanya dapat dipahami melalui kesadaran manusia. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai, makna, dan pemahaman individu terbentuk melalui pengalaman hidup yang dapat berbeda maupun serupa antarindividu. Oleh karena itu, fenomenologi dinilai sesuai untuk mengoperasionalkan konsep nilai dalam konteks penelitian sosial (Kumar et al., 2020). Paradigma interpretif digunakan untuk melihat fenomena sebagaimana dialami dan dimaknai oleh manusia, dengan menempatkan persepsi, pemahaman, dan kesadaran subjektif sebagai sumber utama pengetahuan. Dengan demikian, metode fenomenologi dalam paradigma interpretif dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian, yaitu mengungkap fenomena *fraud* penyalahgunaan aset dari sudut pandang manusia berdasarkan pengalaman yang dijalaninya.

Dalam penelitian ini, peneliti memposisikan diri sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Posisi tersebut berpotensi memunculkan

bias subjektivitas dalam memaknai pengalaman partisipan. Untuk mengendalikan potensi bias, peneliti menerapkan refleksi berkelanjutan melalui pencatatan memo reflektif, melakukan *bracketing* terhadap asumsi awal, serta menggunakan triangulasi data dan sumber guna menjaga kedekatan analisis dengan pengalaman empiris partisipan.

Langkah-langkah penelitian fenomenologi dalam studi ini meliputi penentuan batasan fenomena, penyusunan pertanyaan untuk memperoleh informasi, pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta pengumpulan data sekunder melalui telaah dokumen yang relevan (Creswell, 2020).

Analisis data fenomenologi mencakup proses identifikasi *noema*, *epoche*, *noesis*, *intentional analysis*, dan *eidetic reduction* untuk menangkap esensi pengalaman partisipan terhadap fenomena yang diteliti (Kamayanti, 2021).



Gambar 3.1. Alur Penelitian
Sumber: Olahan Peneliti

HASIL

Untuk memperkuat landasan teoritis pada penelitian ini, *fraud* dalam organisasi dipahami melalui kerangka *Fraud Triangle* yang menjelaskan bahwa tindakan kecurangan muncul dari kombinasi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam konteks organisasi dengan aset bernilai tinggi dan infrastruktur yang tersebar luas, peluang terjadinya *fraud* meningkat ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan efektif serta terdapat celah pengawasan pada proses operasional dan pengadaan.

PT. Aman Sejahtera merupakan anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan teknologi. Perusahaan ini didirikan oleh BUMN berdasarkan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet berkecepatan tinggi dan layanan digital yang stabil semakin meningkat, baik untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, maupun aktivitas sosial sehari-hari. Perubahan ini menuntut perusahaan penyedia layanan informasi dan teknologi untuk beradaptasi dengan cepat melalui penyediaan infrastruktur jaringan yang handal. Kebutuhan mendesak mengenai kemampuan digital menjadi urgensi utama atas pendirian perusahaan ini. Perusahaan yang sudah berdiri selama 13 tahun ini di tahun terakhir mencatat keuntungan sebesar 250 miliar rupiah dengan pendapatan sekitar 7,5 triliun rupiah. Sementara itu, total aset tetap yang dimiliki perusahaan ini adalah sekitar 3 triliun rupiah dengan jenis aset tetap diantaranya infrastruktur jaringan, kabel-kabel tanam bawah tanah, kabel penghubung dengan kisaran harga 4-6 miliar rupiah per meter. Selain itu aset tetap yang dimiliki PT. Aman Sejahtera adalah kendaraan operasional dengan angka kisaran total 500 miliar rupiah. Besaran aset tetap yang dimiliki oleh PT. Aman Sejahtera menjadi salah satu sasaran “empuk” bagi para pelaku *fraud*. Terbukti dari kasus *fraud* yang terjadi di PT. Aman Sejahtera ditemukan bahwa terdapat kasus *provisioning* pengadaan pemasangan jaringan digital baru yang berdampak pada manipulasi laporan keuangan dan memberikan kerugian sebesar 7,4 miliar. Kasus lainnya terkait pemasangan jaringan digital yang dilakukan oleh mitra PT. Aman Sejahtera bekerjasama dengan manager perusahaan yang juga memberikan kerugian bagi PT. Aman Sejahtera. Kasus-kasus ini menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan, dimana PT. Aman Sejahtera memiliki banyak cabang yang tersebar luas di Indonesia, dan penelitian ini fokus pada cabang PT. Aman Sejahtera di provinsi Jawa Barat yang terindikasi kasus *fraud* dari informasi yang didapatkan oleh peneliti.

Secara lebih spesifik, kasus yang terjadi di PT. Aman Sejahtera dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) sebagaimana diklasifikasikan oleh *Association of Certified Fraud Examiners*, yaitu penggunaan atau pengalihan aset organisasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Penyalahgunaan aset tidak hanya mencakup pencurian fisik, tetapi juga manipulasi pengadaan, penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, serta praktik kolusi dengan mitra kerja yang merugikan organisasi. Nilai aset infrastruktur jaringan dan kendaraan operasional yang tinggi menjadikan aset perusahaan sebagai target yang rentan terhadap praktik penyimpangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mereframing *fraud* bukan sekadar sebagai pelanggaran prosedural, melainkan sebagai pengalaman sosial yang dimaknai dan dinormalisasi dalam praktik organisasi sehari-hari. Pendekatan fenomenologi, sebagaimana dipengaruhi oleh pemikiran Edmund Husserl dan dikembangkan dalam penelitian sosial oleh Alfred Schutz, memungkinkan peneliti memahami bagaimana individu membangun makna atas tindakan penyimpangan melalui pengalaman kerja, interaksi sosial, serta pembelajaran organisasi. Dengan demikian, *fraud* dipahami sebagai fenomena yang terbentuk melalui proses interpretasi, rasionalisasi, dan normalisasi dalam lingkungan kerja.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengembangkan model konseptual integratif yang menghubungkan faktor struktural organisasi, dinamika budaya dan praktik kerja, proses rasionalisasi individu, serta praktik penyalahgunaan aset yang terjadi dalam konteks operasional perusahaan. Model ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana *fraud* terbentuk, dipertahankan, dan direproduksi dalam organisasi yang memiliki jaringan operasional luas dan aset bernilai tinggi. Model konseptual integratif penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui interaksi antara faktor struktural organisasi, dinamika budaya kerja, proses rasionalisasi individu, dan praktik operasional sehari-hari. Berikut digambarkan model konseptual integratif dari penelitian ini:



Gambar 3.1. Model Konseptual Integratif Penyalahgunaan Aset dalam Organisasi

Selanjutnya, peneliti kemudian melakukan observasi, dan juga *in depth interview* untuk mengungkap bagaimana fraud terjadi dan jenis fraud apa yang dilakukan di PT. Aman Sejahtera Jawa Barat.

Dalam penelitian ini beberapa orang yang dijadikan informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Nama (disamarkan)	Lama Bekerja	Bidang Pekerjaan Saat ini
1	Rio	5 tahun	Staf Keuangan
2	Sinta	3 tahun	Staf Procurement
3	Amira	10 tahun	Manajer Keuangan
4	Dodi	2 tahun	Staf Logistik
5	Angga	15 tahun	Manajer Logistik
6	Bila	1 tahun	Staf Logistik
7	Agung	10 tahun	Satpam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *fraud* penyalahgunaan aset di PT. Aman Sejahtera dipengaruhi oleh kombinasi karakteristik organisasi, relasi kekuasaan, dan kelemahan sistem pengendalian internal. Besarnya nilai aset tetap perusahaan, terutama infrastruktur jaringan dan kendaraan operasional, menjadi faktor struktural yang meningkatkan kerentanan terhadap fraud, khususnya dalam bentuk pengadaan dan proyek fiktif yang berdampak langsung pada manipulasi laporan keuangan.

Dari perspektif karyawan, *fraud* dipahami sebagai tindakan yang merugikan banyak pihak, namun pemaknaan tersebut tidak tunggal. Sebagian informan memandang *fraud* sebagai pelanggaran etis dan hukum yang harus dihindari, sementara yang lain memaknainya sebagai tindakan yang muncul akibat tekanan ekonomi, kebutuhan hidup, atau kondisi keterpaksaan. Pola ini menunjukkan adanya normalisasi parsial terhadap *fraud*, terutama ketika praktik tersebut dibingkai sebagai respons atas situasi tertentu. Kebanyakan pelaku kecurangan melakukan hal tersebut karena terilit utang kepada orang lain (Maulidi, 2020). Di sisi lain, Zhou et al. (2021) menyebutkan bahwa kecurangan ditentukan oleh individu dengan sikap, keyakinan dan keinginan tertentu. *Fraud* tidak hanya berkaitan dengan hilangnya reputasi, sanksi ekonomi, pengasingan pasar bagi perusahaan dan individu, tetapi juga meliputi pembengkakan biaya, kualitas proyek yang buruk, persaingan yang tidak sehat, atau konstruksi yang tidak aman yang secara terus menerus dapat merusak pembangunan berkelanjutan industry dan masyarakat (Hu et al., 2023). Dodi yang merupakan informan dalam penelitian memiliki pendapat terkait *fraud*:

“Fraud itu perbuatan curang, tipuan, ya merugikan tapi banyak juga yang melakukan hal ini karena terpaksa, mungkin karena kebutuhan atau gengsi hidup semata.”

Dalam konteks penyalahgunaan aset, temuan penelitian mengindikasikan bahwa *fraud* tidak hanya terjadi melalui penggunaan langsung aset perusahaan, tetapi juga melalui penciptaan aset dan proyek fiktif yang melibatkan kolaborasi antarindividu lintas fungsi. Praktik ini difasilitasi oleh akses sistem yang tidak terpisah, penggunaan akun bersama (*account sharing*), serta lemahnya pemisahan fungsi antara pengajuan dan otorisasi, sehingga membuka ruang manipulasi yang sistematis. Ketika pelaku penipuan adalah bagian dari staf manajemen perusahaan atau karyawan yang terkait dengan proses keuangan dan akuntansi, kita dapat menemukan pencurian dalam jumlah besar, karena karyawan seperti ini memiliki akses ke jumlah yang lebih besar dan sekaligus dapat menyembunyikan penipuan dengan lebih efektif (Jimenez Serrano et al., 2025).

Pencurian uang fisik atau transaksi digital digambarkan sebagai kejahatan penyalahgunaan aset yang umum. Ketika karyawan tidak dapat mengakses uang secara langsung, akrual negatif muncul sebagai proses yang berhubungan positif dengan penyalahgunaan (Jimenez Serrano et al., 2025). Hal ini sangat mencolok di perusahaan-perusahaan di mana karyawan berhubungan dekat dengan pelanggan dan seluruh operasi penjualan, seperti di perusahaan penjualan mobil, di mana lebih mudah untuk mengalihkan transaksi dan memalsukan pembayaran di muka, faktur, dll (Setiawan et al., 2022).

Bila selaku informan menceritakan pengalamannya saat bekerja di divisi keuangan.

“Ya gitu mba, sejujurnya saya liat betul itu proyek asset dibuat dan dianggarkan, tapi tidak terealisasi. Bentuk proyeknya infrasktruktur jaringan, awalnya ya saya percaya aja karena setelah acc kontrak, prosedur pengajuan ada di keuangan, eh gataunya palsu. Kerjasama mereka satu tim itu mba. Akun 1 orang digunakan sharing, jadi seolah-olah approval dan pengajuan hanya dilakukan oleh satu orang padahal semua orang bisa aja melakukan approval selama ada akses ke akun tersebut.”

Penelitian ini juga menemukan adanya dilema etis bawahan–atasan sebagai pola dominan dalam terjadinya *fraud*. Perintah atau arahan dari atasan menempatkan bawahan pada posisi sulit antara kepatuhan hierarkis dan kesadaran etis. Dalam situasi ini, relasi kuasa berperan signifikan dalam membentuk rasionalisasi dan keberlanjutan praktik *fraud*, terutama ketika penolakan dianggap berisiko terhadap karier dan keamanan pekerjaan. Penelitian Taherdoost (2021) memiliki gagasan bahwa kepemimpinan etis sangat penting dalam membangun dan mendukung implementasi *fraud risk management*. Onesti & Palumbo (2023) menemukan bahwa kepemimpinan etis berkaitan dengan *fraud risk management* dan penyalahgunaan aset. Oleh karena itu, Alazzabi et al. (2023) menyarankan agar organisasi meningkatkan kepemimpinan etis untuk mendukung penerapan *fraud risk management* sehingga penyalahgunaan aset dapat dikurangi. Dengan demikian, pemimpin dengan etika yang baik dapat meningkatkan etika bawahan mereka dan meningkatkan keterbukaan karyawan mereka untuk meningkatkan kinerja *fraud risk management* dalam memitigasi penyalahgunaan aset.

Berikut pengalaman yang dibagikan beberapa informan mengenai kondisi saat terjadinya fraud;

“Saya sempat bekerja sekitar 7 bulan dengan beliau (terduga pelaku fraud). Ada sekali saya diminta untuk mengajukan pengadaan barang, waktu itu awalnya diminta mengajukan 20 juta rupiah. Saya ajukan, karena pada saat itu saya pikir emang bagian dari proyek yang sudah dianggarkan di tahun sebelumnya dan harus di realisasi di tahun ini. Ternyata alasannya vendor telat kirim terus, barang kosong, dll. Disitu saya gatau kalo akun saya bisa diakses beliau untuk update pengajuan. Sempat disuruh lagi untuk pengajuan berikutnya. Ya saya tau emang gak etis, tapi kalo saya gak turutin karir saya terancam karena beliau atasan saya. 2 kali setelah kejadian itu, pernah ngajuin lagi tapi untungnya saya dipindah ke bagian yang sekarang.”

Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal muncul sebagai faktor kunci yang

memperbesar kesempatan terjadinya *fraud*. Tidak adanya pemantauan berkala, lemahnya kontrol sistem informasi, serta ketidaktegasan mekanisme akuntabilitas memungkinkan praktik pengajuan fiktif dilanjutkan hingga tahap pelaporan pertanggungjawaban palsu, termasuk penggunaan dokumen dan bukti transaksi yang tidak sah. Pengendalian internal yang kuat diyakini dapat memitigasi pengaruh faktor-faktor ini terhadap penyalahgunaan aset (Koomson et al., 2020); (Rahman et al., 2023). Koomson et al. (2020) menemukan bahwa pengendalian internal dapat melemahkan hubungan antara tekanan, rasionalisasi, ego, dan nilai-nilai etika dengan penyalahgunaan aset. Tian dan Sun (2023) melaporkan bahwa pengendalian internal berperan dalam mitigasi penipuan keuangan yang didorong oleh finansialisasi perusahaan dan bahwa aktivitas pengendalian internal, serta sistem informasi dan komunikasi, secara signifikan memengaruhi potensi risiko penipuan. Mendes de Oliveira et al. (2022) menemukan bahwa penipuan terjadi karena kurangnya komitmen terhadap integritas dan ketidakefektifan fungsi pemantauan dalam pengendalian internal. Demikian pula, Rahman, et al. (2023) menegaskan bahwa pengendalian internal yang lemah dan kurangnya akuntabilitas berfungsi sebagai motivasi atau fasilitator untuk penipuan pelaporan keuangan. Berikut keterangan informan menurut pengalamannya selama bekerja di PT. Aman Sejahtera:

“Jadi perusahaan itu punya aplikasi sendiri untuk melakukan pengajuan pengadaan asset atau proyek. Dari aplikasi itu sebenarnya sudah terlihat bahwa ada kelemahan sistem di perusahaan. Karena kan seharusnya yang mengajukan pengadaan hanya boleh satu orang dengan akses yang dibatasi melalui pengembangan sistem untuk teknis sebagai user. Tapi ini tidak dilakukan sehingga user yang mengajukan proyek pengadaan juga sebenarnya bisa melakukan otorisasi. Harusnya kan akses tersebut dipisah sesuai levelling pengguna ya.”

“Yang jadi masalah meskipun pada akhirnya dilakukan, di akhir proyek kan ada laporan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan, nah karena proyek tidak pernah ada disitulah dibuat laporan pertanggungjawaban palsu lewat bon, nota kosong. Nota palsu, cap/stemple palsu, tandatangan palsu dilakukan untuk memuluskan pengajuan fiktif sebelumnya. Kadang ini ada beberapa yang memang kerjasama dengan pihak yang sudah dikenal, tapi saya gak bisa sebutin panjang lebar. Cuma ya itu cara yang dilakukan di kasus kemarin. Saya pikir ini menjadi satu bentuk lemahnya sistem sehingga mudah sekali orang-orang melakukan manipulasi.”

Dampak *fraud* tidak hanya dirasakan pada level organisasi dalam bentuk kerugian finansial dan reputasi, tetapi juga pada level individu karyawan. Temuan menunjukkan adanya penurunan insentif, pemotongan gaji, dan hilangnya kepercayaan internal, yang memperkuat bahwa penyalahgunaan aset memiliki konsekuensi multidimensi, ekonomis, psikologis, dan relasional bagi perusahaan dan para pekerjanya.

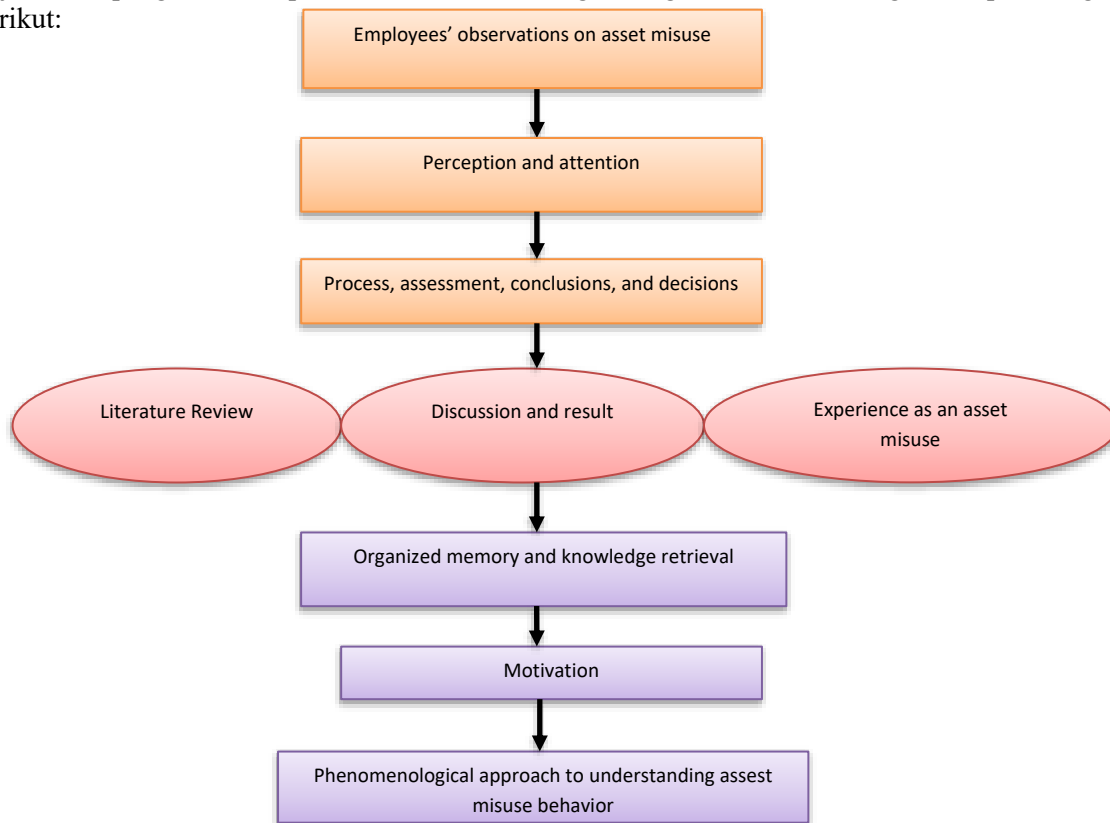
ACFE (2022) menyatakan bahwa penyalahgunaan aset merupakan bentuk penipuan yang paling umum, mewakili 86% kasus penipuan di bidang ketenagakerjaan di seluruh dunia, sebagaimana dilaporkan dalam survei tahun 2022. Kassem (2024) dan Jiménez Serrano et al. (2025) menyatakan bahwa penyalahgunaan aset merupakan bentuk utama penipuan karyawan. Penyalahgunaan aset sering dianggap sebagai jenis penipuan yang paling umum namun paling merugikan, karena dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan kerusakan reputasi jangka panjang bagi suatu organisasi (Jiménez Serrano et al., 2025; Maulidiyah, 2024).

Sejalan dengan pendapat Kassem (2024) dan Jiménez Serrano et al. (2025), pendapat informan mengenai kerugian yang dialami juga ternyata dirasakan oleh para pegawai, tidak hanya dirasakan oleh perusahaan secara keseluruhan.

“Iya merugikan, kasus ini sebenarnya sudah diketahui pegawai sejak lama, tapi yang berani ngomong cuma sedikit. Dan dari kasus ini juga berpengaruh ke insentif yang kami dapatkan. Dalam hal ini contohnya insentif saya. Kan biasanya insentif atau bonus itu asalnya dari pengajuan proyek infrastruktur dan pengadaan lain yang berhasil tapi karena proyek-proyek ini bentuknya fiktif, ya kami jadinya gak dapat insentif/bonus.” Ujar salah satu informan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan para informan, terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting pada penelitian ini, dimana ditemukan bahwa informan memiliki kesadaran penuh atas pengertian mengenai fraud dan penyalahgunaan aset khususnya dapat memberikan kerugian meskipun pengertian ini dipahami secara sederhana. Namun, pada praktiknya, informan memahami betul proses penyalahgunaan aset yang terjadi dari pengalaman dan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini secara ringkas digambarkan dalam gambar pada bagan berikut:



Gambar 4.1. Hasil Penelitian
 Sumber: Olahan Peneliti

Fraud sebagai Proses Manusiawi dalam Konteks Organisasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset di PT. Aman Sejahtera tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran prosedural atau kelemahan sistem pengendalian internal. Meskipun para informan memiliki kesadaran yang cukup mengenai definisi *fraud* dan penyalahgunaan aset serta memahami dampak kerugian yang ditimbulkan, praktik *fraud* tetap terjadi melalui proses yang kompleks dan berlapis. Temuan ini menegaskan bahwa *fraud* merupakan fenomena yang dibentuk melalui interaksi antara pengetahuan, pengalaman, konteks organisasi, dan keputusan manusia.

Secara empiris, penelitian ini memperlihatkan bahwa rasionalisasi menjadi elemen kunci dalam menjembatani kesadaran normatif karyawan dengan praktik penyalahgunaan aset yang terjadi. Rasionalisasi tidak muncul sebagai mekanisme individual yang terisolasi, melainkan sebagai konstruksi psikologis dan sosial yang dibentuk oleh budaya organisasi, relasi kuasa, serta kelemahan sistem pengendalian internal. Ketika praktik seperti penggunaan akun persetujuan bersama dianggap sebagai kewajiban, pembenaran atas penyimpangan menjadi semakin mudah dan

kehilangan disonansi moralnya. Temuan ini memperkuat kritik terhadap *fraud triangle theory* yang cenderung memposisikan rasionalisasi sebagai faktor internal, dengan menunjukkan bahwa rasionalisasi dalam praktik justru merupakan hasil dari proses sosial yang terstruktur. Rasionalisasi sendiri bukanlah sesuatu yang tak terlihat atau tak terelakkan, melainkan sebuah konstruksi psikologis yang dibentuk oleh konteks organisasi (Goldstraw-White, 2012). Ketika karyawan merasakan budaya etika yang lemah, kepemimpinan yang permisif, atau kurangnya koherensi etika, pembenaran diri atas kecurangan menjadi lebih mudah dan kurang disonansi secara moral (Jiménez Serrano et al., 2025).

Dalam tahap awal, karyawan melakukan pengamatan terhadap penggunaan aset dalam aktivitas operasional sehari-hari. Ketidaksihinggaan antara pencatatan dan realisasi aset, keberadaan proyek infrastruktur yang tidak terealisasi, serta praktik informal yang menyimpang dari SOP menjadi pengalaman empiris yang membentuk persepsi dan atensi karyawan. Pada tahap ini, penyalahgunaan aset mulai dipersepsikan bukan sebagai anomali, melainkan sebagai bagian dari rutinitas organisasi. Normalisasi penyimpangan (*normalization of deviance*) pun mulai terbentuk, di mana pelanggaran kecil dianggap wajar dan tidak layak untuk dipersoalkan.

Seiring dengan terbentuknya normalisasi tersebut, karyawan menghadapi dilema etis yang lebih kompleks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karyawan tidak sepenuhnya pasif atau tidak sadar, melainkan melakukan penilaian etis dan rasional atas situasi yang dihadapi. Mereka mempertimbangkan risiko personal, konsekuensi struktural, serta relasi kuasa yang melekat dalam organisasi. Pada tahap ini, keputusan untuk diam, menyesuaikan diri, atau menyampaikan secara informal mencerminkan bahwa penyalahgunaan aset merupakan hasil dari keputusan manusia dalam konteks tekanan dan keterbatasan, bukan sekadar akibat dari kegagalan sistem semata.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman karyawan mengenai *fraud* dan penyalahgunaan aset dibentuk melalui integrasi antara pengetahuan formal, pengalaman langsung, dan pemaknaan kolektif di dalam organisasi. Informan secara umum memahami bahwa *fraud* merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan, serta menyadari bahwa lemahnya pengendalian internal menciptakan kesempatan terjadinya penyimpangan. Namun, narasi mengenai tindakan yang “masih bisa ditoleransi” secara perlahan membentuk kebiasaan untuk mewajarkan praktik-praktik tidak etis. Integrasi pengalaman ini kemudian membangun kerangka kognitif dan moral yang memengaruhi cara karyawan memaknai, merespons, dan bahkan mengingat praktik penyalahgunaan aset.

Pada tahap selanjutnya, pengalaman dan pengetahuan tersebut tersimpan sebagai memori individu dan organisasi dalam bentuk praktik tidak tertulis, pola lama, serta pembelajaran implisit dari kasus sebelumnya yang tidak terdokumentasi secara formal. Memori ini berpotensi direproduksi ketika organisasi menghadapi situasi serupa di masa depan, terutama jika tidak disertai evaluasi dan perbaikan sistemik. Dengan demikian, *fraud* tidak hanya bersifat insidental, tetapi dapat menjadi bagian dari siklus yang berulang dalam kehidupan organisasi.

Motivasi menjadi faktor penentu dalam menentukan posisi karyawan terhadap penyalahgunaan aset, apakah memilih untuk mencegah, membiarkan, atau terlibat secara langsung. Temuan menunjukkan bahwa motivasi karyawan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, rasa keadilan dan ketidakadilan, loyalitas terhadap atasan, serta kebutuhan psikologis dan keamanan kerja. Pada titik ini, elemen tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagaimana dijelaskan dalam *Fraud Triangle Theory* muncul secara nyata dalam pengalaman hidup karyawan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam konteks sosial dan relasional organisasi.

Melalui pendekatan fenomenologis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori *fraud* dengan menempatkan pengalaman manusia sebagai pusat analisis. *Fraud* tidak hanya dipahami melalui angka, laporan keuangan, atau kepatuhan terhadap SOP, tetapi sebagai fenomena sosial yang sarat dengan makna, dilema moral, dan negosiasi nilai. Pendekatan ini memperluas pemahaman *Fraud Triangle Theory* dengan menunjukkan bahwa rasionalisasi, tekanan, dan kesempatan merupakan proses yang dialami, dimaknai, dan dinegosiasikan oleh individu dalam konteks organisasi tertentu.

Dalam kerangka *humanistic accounting*, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* tidak cukup dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian dan sanksi formal semata. Akuntansi perlu dipahami sebagai praktik sosial yang berperan dalam membentuk kesadaran, nilai, dan tanggung jawab moral manusia di dalam organisasi. Dengan demikian, pendekatan humanistik mendorong organisasi untuk tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi juga membangun budaya etis, kepemimpinan yang reflektif, dan ruang dialog yang memungkinkan karyawan merefleksikan makna tindakannya. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *fraud* adalah fenomena manusiawi yang hanya dapat dipahami secara utuh ketika dimaknai melalui pengalaman hidup, kesadaran moral, dan konteks sosial tempat tindakan tersebut berlangsung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset di PT. Aman Sejahtera tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran prosedural atau kelemahan pengendalian internal, tetapi sebagai fenomena perilaku yang terbentuk melalui proses kognitif, pengalaman, dan motivasi individu dalam konteks organisasi. Observasi terhadap praktik penggunaan aset, interaksi sosial, serta pengalaman kerja membentuk persepsi dan rasionalisasi yang memengaruhi bagaimana karyawan menilai, merespons, atau menormalisasi penyimpangan.

Temuan penelitian mengungkap bahwa memori pengalaman organisasi dan pembelajaran sosial berperan sebagai referensi perilaku yang dapat memperkuat normalisasi maupun pencegahan penyalahgunaan aset. Motivasi individu yang dipengaruhi oleh tekanan kerja, persepsi keadilan, dan pertimbangan risiko personal menjadi jembatan antara pengetahuan dan tindakan dalam menghadapi peluang *fraud*.

Melalui pendekatan fenomenologis, penelitian ini mereframing penyalahgunaan aset dari perspektif struktural-instrumental menuju proses sosial-kognitif yang dikonstruksi melalui *lived experience* dalam organisasi. Perspektif ini memperluas kerangka *Fraud Triangle* dengan menempatkan rasionalisasi sebagai proses dinamis yang dibentuk oleh persepsi, memori, dan konteks sosial.

Implikasinya, pencegahan penyalahgunaan aset tidak cukup dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, tetapi juga memerlukan pembangunan budaya etis, kepemimpinan reflektif, serta ruang dialog organisasi yang mendukung kesadaran moral. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif akuntansi humanistik yang menempatkan manusia sebagai subjek moral dalam praktik organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada institusi tempat saya bernaung, Universitas Telkom yang senantiasa memberikan dukungan penuh bagi saya untuk terus berkontribusi dalam penelitian.

REFERENSI

- Agnihotri, A., & Bhattacharya, S. (2020). Impact of female executives' fraudulent behaviour on other women employees: A contingency framework of stigma by association. *International Journal of Organizational Analysis*, 28(4), 793–815. <https://doi.org/10.1108/IJOA-06-2019-1785>
- Alazzabi, W. Y. E., Mustafa, H., & Karage, A. I. (2023). Risk management, top management support, internal audit activities and fraud mitigation. *Journal of Financial Crime*, 30(2), 569–582. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0147>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). Occupational fraud 2024: A report to the nations. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2024/>
- Baten, A. M. (2020). Basic Understanding of Fraudulent Activities in Corporate Organization. *Review of Business, Accounting, & Finance*, 1(1), 1–13. <https://ssrn.com/abstract=3756963>
- Çollaku, L., Ramushi, A. S., & Aliu, M. (2025). Fraud intention and the relationship with selfishness: the mediating role of moral justification in the accounting profession. *International Journal of Ethics and Systems*, 41(4), 955–972. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2023-0220>

- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. The Free Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2020). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dorminey, J., Scott Fleming, A., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Goldstraw-White, J. (2012). *White-collar crime: Accounts of offending behaviour*. Palgrave Macmillan.
- Hollinger, R. C., Slora, K. B., & Terris, W. (1992). Deviance in the fast-food restaurant: Correlates of employee theft, altruism, and counterproductivity. *Deviant Behavior*, 13(2), 155–184. <https://doi.org/10.1080/01639625.1992.9967906>
- Hu, H., Deng, X., & Mahmoudi, A. (2023). A cognitive model for understanding fraudulent behavior in construction industry. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 30(4), 1423–1443. <https://doi.org/10.1108/ECAM-08-2021-0703>
- Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024. <https://antikorupsi.org>
- Jimenez Serrano, J., Delgado Rodríguez, M. J., Rodríguez Iglesias, I., & López Pérez, R. M. (2025). Crime of misappropriation of assets in the business context. A systematic review. *Accounting Research Journal*, 38(1), 122–140. <https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2024-0237>
- Jiménez Serrano, J., Delgado Rodriguez, M. J., Rodriguez Iglesias, I., & López Pérez, R. M. (2025). Misappropriation of assets: a quantitative and qualitative analysis of occupational fraud management in organizations. *Journal of Financial Crime*, 32(5), 994–1013. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2025-0016>
- Kamayanti, A. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. Malang: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kassem, R. (2024). Police Crime: Investigating Insider Fraud in UK Policing. *Deviant Behavior*, 45(2), 226–246. <https://doi.org/10.1080/01639625.2023.2244116>
- Koomson, T. A. A., Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., & Oquaye, M. (2020). Determinants of asset misappropriation at the workplace: the moderating role of perceived strength of internal controls. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1191–1211. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0067>
- Kumar, S., Sureka, R., & Pandey, N. (2020). Forty-five years of the International Journal of Social Economics (IJSE): a bibliometric overview. *International Journal of Social Economics*, 47(7), 831–849. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2019-0492>
- Maulidi, A. (2020). When and why (honest) people commit fraudulent behaviours?: Extending the fraud triangle as a predictor of fraudulent behaviours. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 541–559. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2019-0058>
- Maulidiyah, D. N. (2024). Consensus on the role of culture in restraining financial crime: a systematic literature review. *Journal of Financial Crime*, 31(4), 883–897. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2023-0103>
- Mendes de Oliveira, D. K., Imoniana, J. O., Slomski, V., Reginato, L., & Slomski, V. G. (2022). How do Internal Control Environments Connect to Sustainable Development to Curb Fraud in Brazil? *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095593>
- Onesti, G., & Palumbo, R. (2023). Tone at the Top for Sustainable Corporate Governance to Prevent Fraud. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15032198>
- Ovcharuk, B. (2024). Impartial third and disinterested judgment: Kojève and Arendt's cosmopolitan phenomenologies of human rights as a response to Schmitt. *Journal of International Political Theory*, 20(2), 140–160. <https://doi.org/10.1177/17550882231197720>
- Pruysers, S., Blais, J., & Chen, P. G. (2019). Who makes a good citizen? The role of personality. *Personality and Individual Differences*, 146(April), 99–104. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.007>
- PwC. (2018). *Global economic crime and fraud survey*. PricewaterhouseCoopers LLP.
- Rahman, M. J., Jiaying, H., Hossain, M. M., Biswas, S., Tanha, M., & Rana, T. (2023). Financial statement fraud: US and Chinese case studies. *International Journal of Managerial and*

- Financial Accounting, 15(4), 413–441.
- Republic, C. (2018). *Crime and Fraud Czech Republic*.
- Schuessler, K. F. (1954). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Donald R. Cressey . *American Journal of Sociology*, 59(6), 604–604. <https://doi.org/10.1086/221475>
- Setiawan, N., Tarjo, T., & Haryadi, B. (2022). Asset Misappropriation Employee Fraud: A Case Study on an Automotive Company in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 214. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i02.p03>
- Taherdoost, H. (2021). A review on risk management in information systems: Risk policy, control and fraud detection. *Electronics (Switzerland)*, 10(24). <https://doi.org/10.3390/electronics10243065>
- Van Akkeren, J., & Buckby, S. (2017). Perceptions on the Causes of Individual and Fraudulent Co-offending: Views of Forensic Accountants. *Journal of Business Ethics*, 146(2), 383–404. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2881-0>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wimbush, J. C., & Dalton, D. R. (1997). Base rate for employee theft: Convergence of multiple methods. *Journal of Applied Psychology*, 82(5), 756–763. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.82.5.756>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). FTE Penipuan Diamond: Mengingat Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Zhou, H., Sun, G., Fu, S., Wang, L., Hu, J., & Gao, Y. (2021). Internet Financial Fraud Detection Based on a Distributed Big Data Approach with Node2vec. *IEEE Access*, 9, 43378–43386. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3062467>